

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kudeta dapat menjadi indikator kemunduran demokrasi di suatu negara (Firdaus & Dwiprigitaningtias, 2021). Hal ini terjadi pada negara Myanmar yang sedang dalam transisi negara otoriter menuju negara demokrasi. Sejak kemerdekaan tahun 1948, Myanmar sudah mengalami kudeta tiga kali. Kudeta pertama yang terjadi pada tahun 1962, merupakan titik awal pemerintahan Myanmar dipimpin oleh militer dengan satu partai sebagai dominasi politik. Kudeta kedua pada tahun 1988 atau disebut sebagai *The 8888 Uprising* menjadikan peristiwa tersebut identik dengan agenda pemberontakan kekuatan rakyat karena adanya isolasi ekonomi dan penguatan militer yang menyebabkan kemiskinan berkepanjangan. Pada tahun 2021, kudeta ketiga terjadi setelah pemilihan umum di mana militer tidak menerima hasil pemilihan tersebut dan akhirnya angkatan bersenjata menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan negara akan dikembalikan ke militer (Firdaus & Dwiprigitaningtias, 2021).

Myanmar merupakan salah satu anggota organisasi regional ASEAN di mana kondisi kudeta Myanmar sangat berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan ASEAN. Pemerintahan Myanmar yang dipimpin oleh junta militer ini tidak dapat diintervensi oleh ASEAN karena prinsip nonintervensi dalam permasalahan internal suatu negara anggota (Mueller, 2021). Pada tahun 1967, ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok, yang memuat sejumlah perjanjian kerja sama yang

mengikat negara anggota. Perjanjian kerja sama ini disebut sebagai program Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) yang mengikat negara-negara di Asia Tenggara dengan sebuah hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (ASEAN Secretariat, 2013).

Program kerja sama pembangunan internasional ASEAN Connectivity, bertujuan untuk integrasi regional di sekitar kawasan Asia Tenggara yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan internasional (Bhattacharyay, 2010). Pembangunan yang terintegrasi dapat menjadi katalisator utama dalam perdagangan lintas negara sehingga rantai pasokan global serta jaringan produksi internasional akan semakin meningkat (Fornalé, 2018). Peningkatan ekonomi dari adanya pembangunan menunjukkan pentingnya suatu negara untuk membangun jaringan perdagangan (Sa-Ngiamwibool & Wisaeng, 2021). Pembangunan jaringan integrasi ASEAN sebelumnya sangat bergantung pada investasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur seperti dari pihak bank investasi multilateral dan bantuan bilateral lainnya (Development Bank, 2017). Menyadari pentingnya kemandirian pada pembangunan, ASEAN fokus pada rencana ASEAN Connectivity 2025 yang berusaha menjadi kawasan yang terhubung dan terintegrasi dengan lancar dan komprehensif (Fünfgeld, 2019). Organisasi regional ASEAN akan meningkatkan kompetisi, inklusivitas dan rasa solidaritas yang lebih luas (ASEAN Secretariat, 2016).

ASEAN Connectivity pertama kali diluncurkan melalui MPAC 2010 dengan tiga pilar utama yaitu *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity*. Ketiga pilar dalam ASEAN Connectivity masing-

masing memiliki program yang menunjang konektivitas. Pilar pertama sebagai pembangunan fisik yaitu *physical connectivity* terdiri dari program ASEAN Highway Network (AHN), India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) dan proyek lainnya yang menghubungkan antarnegara ASEAN. Pada pilar *institutional connectivity* terdiri dari program yang menunjang proyek infrastruktur fisik dan mobilitas orang dalam bentuk harmonisasi regulasi dan koordinasi. Pilar terakhir, *people-to-people connectivity*, yang tidak kalah penting sebagai instrumen penting dalam integrasi kawasan (ASEAN Secretariat, 2017).

Program pembangunan ASEAN Connectivity memerlukan kestabilan kawasan untuk membantu program berjalan dengan mulus. Adanya kudeta yang terjadi di Myanmar menyebabkan ASEAN sebagai organisasi regional yang beranggotakan Myanmar harus turut andil dalam penyelesaian masalah. ASEAN tidak memiliki hak untuk menjadi pihak ketiga penyelesaian konflik, sesuai dengan prinsip nonintervensi. Namun, ASEAN dapat menjadi jembatan dialog untuk melakukan mediasi. ASEAN sudah berusaha melalui diplomasi Five-Point Consensus pada 2021 tentang membangun dialog konstruktif meliputi penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan dan lainnya (Kusumawardhana, 2021). Dialog ini tidak berjalan mulus karena kurangnya kerja sama pihak junta militer Myanmar kepada delegasi ASEAN (Putri et al., 2021). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi Myanmar sebagai negara yang berkonflik namun juga turut berpengaruh pada proyek kerja sama pembangunan internasional ASEAN Connectivity.

Proyek ASEAN Connectivity melibatkan banyak mitra internasional dalam menunjang proyek pembangunan. Mitra internasional yang ikut terlibat dalam program kerja sama pembangunan internasional melibatkan Amerika Serikat, Uni Eropa dan India. Kondisi kudeta Myanmar menimbulkan kekhawatiran mitra internasional, salah satunya India, yang terlibat dalam proyek India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway jalan raya sepanjang 1.400 km yang menghubungkan India-Bangladesh, Myanmar, dan Thailand (Bhowmick, 2024). Proyek ini seharusnya rampung pada 2015, diperpanjang hingga 2019 dan kembali diperpanjang hingga 2027. Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar menyampaikan pidato pada kegiatan “Advantage Assam Summit in Guwahati” bahwa proyek IMT-TH baru mencapai 70% dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan khususnya Myanmar (Parashar, 2025).

Thailand menjadi contoh negara lain yang terdampak dari adanya ketidakstabilan politik Myanmar. Thailand sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar menunjukkan kekhawatiran mengenai jalan *ASEAN Highway* yang rusak akibat konflik Myanmar. Thailand menginisiasikan untuk dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat memperbaiki jalan raya utama. Jalan raya (AH1) tersebut merupakan wilayah perbatasan dengan luas 1.500 km dari Myawaddy perbatasan Thailand-Myanmar serta jalur perdagangan senilai USD 1 miliar per tahun. (Wongcha-um & Ghoshal, 2024). Respon lain ditunjukkan oleh Singapura dan Cina sebagai dua negara paling banyak melakukan investasi asing di Myanmar juga ikut terdampak, beberapa perusahaan Singapura sementara menghentikan perdagangannya. Cina mengemukakan

kekhawatiran pada negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik (BBC News, 2021).

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya kudeta menimbulkan dinamika dalam pembangunan kawasan. ASEAN Connectivity dirancang sebagai program konektivitas yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh negara anggota, termasuk Myanmar yang memiliki posisi geografis krusial yang menjadi penghubung dengan negara lain. Namun, di tengah berbagai dinamika, India tetap mendorong penyelesaian IMT-TH karena merupakan satu-satunya jalur darat yang akan menghubungkan ASEAN dengan India (Parashar, 2025). Thailand sebagai negara yang ikut terdampak juga tetap menginisiasi dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk menjaga kelancaran jalur perdagangan perbatasan (Wongcha-um & Ghoshal, 2024).

Respon yang ditunjukkan dalam dinamika kawasan menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik menghambat kelangsungan program kerja sama yang membutuhkan partisipasi aktif negara anggota. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan pada implementasi program ASEAN Connectivity yang memerlukan keterlibatan kolektif dan koordinasi lintas negara. Namun, negara-negara anggota ASEAN tetap memiliki kepentingan terhadap pembangunan konektivitas kawasan. Berangkat dari adanya ketegangan antara dinamika politik dan kepentingan kolektif, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana program kerja sama pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika politik, dengan mengkaji bentuk-bentuk adaptasi yang ditempuh, dinamika interaksi antaraktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan program di kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika program kerja sama ASEAN Connectivity di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana keberlanjutan program ASEAN Connectivity tetap berlanjut di tengah kudeta Myanmar 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kelangsungan program ASEAN Connectivity di tengah kudeta Myanmar 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan khusus penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kudeta Myanmar terhadap kerja sama pembangunan internasional di kawasan ASEAN.
2. Mengidentifikasi perubahan pola kerja sama pembangunan internasional sebelum dan sesudah terjadinya kudeta Myanmar.
3. Mengidentifikasi mekanisme kerja sama pembangunan ASEAN Connectivity yang tetap berjalan di tengah ketidakstabilan politik Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diklasifikasikan dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis berikut ini:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran organisasi regional dalam kerja sama pembangunan internasional di tengah kondisi kudeta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai program ASEAN Connectivity yang tetap berlanjut di tengah situasi kudeta Myanmar tahun 2021. Pengimplementasian pendekatan *complex interdependence* diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam implementasi konsep ini dalam Hubungan Internasional ketika menganalisa permasalahan yang memungkinkan kerja sama pembangunan tetap berlangsung meskipun terdapat ketidakstabilan politik salah satu negara anggota.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi ilmu pengetahuan dari penelitian ini yakni berguna untuk memahami mekanisme kelangsungan kerja sama pembangunan internasional dalam situasi ketidakstabilan politik domestik suatu negara. Penelitian ini diproyeksikan untuk dapat berperan dalam memperluas ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada hal interaksi antara konflik politik dan kerja sama pembangunan internasional. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya

yang mengkaji antara stabilitas politik suatu negara dengan kelangsungan pembangunan internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis merupakan bagian yang memiliki tujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang ada pada penelitian, dan guna menguraikan tantangan yang ada pada fenomena penelitian.

1.5.1 Review Literatur

Analisis mengenai keberlanjutan kerja sama pembangunan ASEAN Connectivity di tengah kondisi kudeta Myanmar memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan. Tinjauan pustaka berikut dapat memberikan analisis untuk membantu memberikan landasan pemahaman bagi penelitian ini untuk memahami bagaimana ketidakstabilan politik dapat memengaruhi kerja sama pembangunan. Dalam memahami kudeta Myanmar terhadap respon ASEAN, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dalam judul “Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar” mengkaji pola kerja sama ASEAN dalam menghadapi krisis Myanmar. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa prinsip nonintervensi ASEAN memberikan posisi dilematis bagi ASEAN antara penghormatan kedaulatan negara atau penyelesaian konflik, namun pada akhirnya ASEAN berhasil mengadaptasi bentuk Five-Point Consensus, namun tidak secara signifikan memberikan solusi atas

keterbatasan prinsip nonintervensi dan dampak dari kudeta Myanmar terhadap ASEAN Connectivity.

Melengkapi perspektif ASEAN dalam menghadapi situasi kudeta Myanmar, penelitian dari Hakiem (2022) dalam judul “Pengaruh Kudeta Militer Myanmar terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN pada tahun 2021” fokus pada pengaruh kudeta militer Myanmar terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana stabilitas kawasan terpengaruh oleh adanya konflik, namun masih terbatas dalam bidang keamanan sehingga belum mengeksplorasi dampak jangka panjang pada kerja sama pembangunan seperti program ASEAN Connectivity. Berbeda dari tulisan sebelumnya, tulisan pada penelitian ini lebih membahas pada aspek politik dan keamanan dalam kerja sama pembangunan internasional ASEAN Connectivity, penelitian dari Vidya & Taghizadeh-Hesary (2021) dalam judul “*Does Infrastructure Facilitate Trade Connectivity? Evidence from the ASEAN*” menganalisis program ASEAN Connectivity dari perspektif ekonomi, khususnya dampaknya terhadap perdagangan antara negara-negara ASEAN, India, Cina, dan Jepang. Penelitian tersebut menyoroti signifikansi program ASEAN Connectivity dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dengan aspek pembangunan dan peningkatan infrastruktur menunjukkan korelasi yang positif.

Pada penelitian lain yang serupa membahas ASEAN Connectivity, penelitian ini berfokus pada studi kasus kerja sama pembangunan pasca

kudeta. Penelitian dari (Abb et al., 2025) dengan judul “*Road through a broken place: the BRI in post-coup Myanmar*” menganalisis bagaimana proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) terpengaruh oleh kondisi politik Myanmar pasca kudeta. Penelitian ini menyoroti kondisi Myanmar yang membuat implementasi proyek kerja sama pembangunan tidak dapat berjalan secara terpusat, namun harus menyesuaikan dengan berbagai pihak seperti pemerintah lokal, aktor lokal hingga kelompok bersenjata. Berfokus pada kerja sama pembangunan bilateral antara Cina dan Myanmar, penelitian ini belum mengkaji secara langsung bagaimana dampaknya pada kerangka kerja sama pembangunan multilateral seperti ASEAN Connectivity.

Selain penelitian mengenai pembangunan di kawasan Asia Tenggara, beberapa penelitian mengenai pembangunan di negara yang mengalami ketidakstabilan politik dapat menjadi acuan. Penelitian yang dilakukan oleh (Goodhand & Sedra, 2010) dengan judul “*Who Owns the Peace? Aid, Reconstruction, and Peacebuilding in Afghanistan*” menganalisa dinamika bantuan internasional dan proses rekonstruksi di Afghanistan pasca konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di negara yang mengalami ketidakstabilan politik tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah nasional, namun juga melibatkan berbagai aktor internasional, organisasi dan otoritas pemerintah domestik. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara pembangunan dan konflik yang terjadi di Afghanistan sehingga tidak

secara langsung membahas kerja sama pembangunan regional seperti ASEAN Connectivity. Namun, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana proyek pembangunan dapat berlangsung dalam kondisi ketidakstabilan politik.

Penelitian selanjutnya yang membahas kelangsungan pembangunan di tengah ketidakstabilan politik dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bowen Jr et al., 2013) dengan judul *“Interagency Rebuilding Efforts in Iraq: A Case Study of the Rusafa Political District.”* Penelitian ini membahas bagaimana upaya pembangunan kembali di Iraq tetap berjalan meskipun kondisi Iraq sedang menghadapi konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan lemahnya kapasitas institusi negara setelah invansi tahun 2003. Dengan studi kasus di distrik Rusafa di Baghdad, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetap terlaksana melalui koordinasi lintas lembaga antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan aktor internasional. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan dapat berlangsung apabila terdapat mekanisme koordinasi yang efektif dan strategi adaptif dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Berdasarkan analisis berbagai tinjauan pustaka, terdapat kesenjangan antara hubungan kudeta Myanmar dengan pengimplementasian program pembangunan ASEAN Connectivity, di mana sebagian besar penelitian hanya tertuju pada aspek dan program tertentu, sehingga belum menganalisis spesifik bagaimana keberlanjutan ASEAN

Connectivity di tengah kudeta. Sebagian besar penelitian mengenai kudeta Myanmar berfokus pada aspek politik dan keamanan, sementara penelitian mengenai ASEAN Connectivity hanya fokus pada bidang ekonomi sehingga ASEAN Connectivity belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek ketidakstabilan politik domestik. Sehingga dapat ditarik *State of the Art* penelitian ini yakni memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan dinamika politik domestik dengan program kerja sama pembangunan internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan menganalisis keberlanjutan ASEAN Connectivity sebagai program kerja sama pembangunan di tengah kudeta, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara stabilitas politik dan kerja sama pembangunan internasional.

1.5.2 Kerangka Berpikir

Adam Smith dalam gagasannya melalui pendekatan liberalisme mengatakan bahwa, sifat ketergantungan manusia atau interdependensi menjadikan negara berlomba-lomba melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan negara serta menghindari ancaman. Perspektif liberalisme dari Adam Smith dengan prinsip-prinsip liberalisme melahirkan teori interdependensi (Fauziyyah & Paksi, 2023).

Teori *complex interdependence* dari (Keohane & Nye, 2012) dalam buku “Power and Interdependence” menjelaskan sebuah situasi ketika terdapat kendala dan peluang dalam pengambilan keputusan, namun terhimpit oleh situasi dan kondisi yang saling ketergantungan. Pada situasi

tersebut, negara akan fokus kepada permasalahan mana yang menjadi prioritas serta permasalahan mana yang lebih membutuhkan kompromi. Penelitian ini menggunakan *complex interdependence* yang menjelaskan bahwa pola hubungan kontemporer tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer sebagaimana diasumsikan oleh perspektif realisme, melainkan identik dengan kondisi saling ketergantungan kompleks antarnegara dan aktor nonnegara.

(Keohane & Nye, 2012) menyatakan bahwa *complex interdependence* memiliki tiga karakteristik utama. Pertama *multiple channels*, yakni tersedianya berbagai saluran interaksi yang menghubungkan negara dan aktor lain seperti organisasi internasional, lembaga donor, pihak swasta, maupun masyarakat sipil. Karakteristik kedua, *absence of hierarchy among issue*, yang menyatakan bahwa hubungan internasional tidak lagi fokus pada isu keamanan militer, namun juga mencakup isu ekonomi, pembangunan, perdagangan, dan konektivitas kawasan. Karakteristik terakhir, *minor role of military force*, di mana penggunaan kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen utama dalam mengelola hubungan antarnegara.

Dalam kerangka interdependensi kompleks, interaksi antarnegara semakin terhubung melalui berbagai jaringan kerja sama yang memperkuat keterlibatan antar aktor. Keterlibatan tersebut menciptakan ketergantungan timbal balik yang membuat negara tidak dapat secara sepihak memutus hubungan kerja sama meskipun terjadi konflik politik atau ketidakstabilan

politik domestik pada salah satu pihak. Maka dari itu, *complex interdependence* membantu menjelaskan bagaimana kerja sama internasional tetap dapat berlanjut meskipun terdapat dinamika politik yang berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antarnegara.

Dalam konteks stabilitas kawasan, perdamaian menurut pandangan (Keohane & Nye, 2012) dalam pendekatan *complex interdependence*, dapat tercipta dengan adanya kerja sama ekonomi. Kerja sama ekonomi dalam pembangunan dilakukan sebagai cara negara untuk memperoleh keuntungan bersama. Sehingga dalam konteks kondisi kudeta Myanmar, kerja sama pembangunan internasional ASEAN Connectivity dapat menjadi sebuah jawaban atas hubungan interdependensi kompleks yang juga dapat meningkatkan keterhubungan di Asia Tenggara yang mencerminkan interdependensi ekonomi dan sosial di kawasan (ASEAN Secretariat, 2013).

Pendekatan *complex interdependence* menjadi relevan untuk memahami dinamika kerja sama pembangunan dalam kerangka ASEAN Connectivity. Program ASEAN Connectivity sebagai inisiatif kawasan untuk meningkatkan integrasi Asia Tenggara lewat penguatan konektivitas fisik, institusional, dan hubungan antar masyarakat. Program kerja sama pembangunan ini melibatkan berbagai aktor, tidak hanya negara anggota ASEAN, tetapi juga organisasi internasional, lembaga donor, pihak swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lain yang berperan dalam mendukung pembangunan kawasan.

Adanya berbagai aktor yang terlibat dalam ASEAN Connectivity menunjukkan bahwa implementasi ASEAN Connectivity menunjukkan karakteristik *multiple channels* dalam pendekatan *complex interdependence*. Interaksi yang terjadi tidak hanya pada tingkat pemerintah, namun juga melalui jaringan kerja sama yang melibatkan lembaga pembangunan internasional dan aktor nonnegara. Keterlibatan berbagai aktor memungkinkan keberlanjutan program pembangunan melalui berbagai jalur kerja sama walaupun menghadapi tantangan politik pada salah satu negara anggota.

Dalam konteks penelitian ini, dinamika pola hubungan menjadi penting ketika terjadi kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021. Kudeta memicu ketidakstabilan politik domestik yang memengaruhi hubungan Myanmar dengan negara-negara anggota ASEAN dan berbagai mitra pembangunan internasional. Ketidakstabilan politik Myanmar mengganggu kelangsungan beberapa proyek konektivitas, khususnya proyek yang melibatkan atau melintasi Myanmar sebagai bagian dari jaringan pembangunan kawasan.

Dalam kerangka *complex interdependence*, gangguan politik pada satu negara tidak secara otomatis menghentikan berlangsungnya keseluruhan program kerja sama. Ketergantungan antarnegara dalam jaringan pembangunan kawasan dapat mendorong aktor-aktor regional untuk melakukan penyesuaian mekanisme kerja sama agar program tetap dapat berlangsung. Dalam kondisi ini, hubungan interdependensi yang

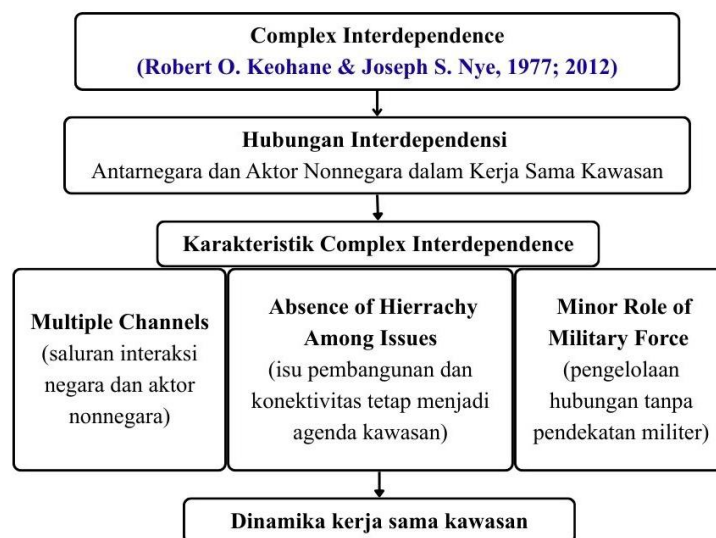
terbentuk melalui jaringan kerja sama pembangunan kawasan memungkinkan adanya mekanisme adaptasi, seperti diversifikasi jalur konektivitas, penyesuaian proyek pembangunan, maupun penguatan kerja sama sub kawasan.

Implementasi *absence of hierarchy among issue* dapat terlihat dalam keberlanjutan ASEAN Connectivity dimana isu pembangunan dan konektivitas menjadi salah satu prioritas yang dipandang penting bagi integrasi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antarnegara tidak didominasi oleh satu isu, namun juga menempatkan isu lainnya sebagai agenda strategi yang terus dijalankan secara kolektif.

Dalam merespon dinamika politik domestik Myanmar, sikap yang diambil oleh ASEAN menunjukkan karakteristik dari *minor role of military force*. Respon yang diambil ASEAN mengutamakan mekanisme diplomasi, dialog politik, serta koordinasi kebijakan dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam isu-isu non keamanan, pengelolaan hubungan antarnegara lebih diutamakan instrumen institusional. Melalui mekanisme tersebut, agenda pembangunan kawasan tetap dapat berjalan dalam kerangka kerja sama yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, *complex interdependence* dari (Keohane & Nye, 2012) digunakan sebagai pendekatan utama untuk memahami hubungan ketergantungan antaraktor dalam pembangunan kawasan. Melalui tiga karakteristik utamanya, yaitu *multiple channels*, *absence of hierarchy of*

issues, dan *minor role of military force*, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama yang melibatkan aktor negara dan nonnegara memungkinkan keberlanjutan program pembangunan kawasan meskipun dihadapkan oleh dinamika politik salah satu negara anggota. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana program ASEAN Connectivity tetap berjalan di tengah kudeta Myanmar tahun 2021.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : telah diolah oleh penulis dari (Keohane & Nye, 2012)

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Multiple Channels

Multiple channels yakni tersedianya berbagai saluran dalam *complex interdependence* menghubungkan masyarakat lintas negara. Menurut (Keohane & Nye, 2012), hubungan internasional

tidak hanya berlangsung melalui jalur diplomatik formal antarnegara, namun juga melalui berbagai bentuk interaksi lain yang melibatkan aktor negara dan aktor nonnegara. *Multiple channels* terdiri dari tiga bentuk interaksi, yakni antarnegara (*interstate*) yang dilakukan melalui jalur diplomatik resmi, transpemerintah (*transgovernmental*) yang terjadi ketika unit pemerintah seperti kementerian teknis atau birokrasi tingkah menengah berinteraksi secara langsung dengan mitra di negara lain tanpa koordinasi melalui kementerian luar negeri, dan hubungan transnasional (*transnational*) yang melibatkan aktor nonnegara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, lembaga donor, maupun masyarakat sipil.

Tersedianya berbagai saluran menunjukkan bahwa negara tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya aktor yang mengendalikan hubungan internasional. Pandangan ini sejalan dengan gagasan (Rosenau, 2004) mengenai dunia yang bersifat *multi centric*. Rosenau menjelaskan bahwa dalam sistem global yang modern, otoritas tidak hanya berada pada pemerintah negara, namun juga tersebar melalui berbagai aktor yang ia sebut sebagai *sovereignty free actors*. Pada kondisi tersebut, proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada perjanjian antarpemerintah, namun juga melalui jaringan komunikasi, kerja sama teknis, dan mekanisme antar lembaga. Dengan demikian, tersedianya beragam

saluran menunjukkan bahwa hubungan internasional kini melibatkan banyak aktor, sehingga negara tidak lagi menjadi satu-satunya pusat dalam proses pengambilan keputusan.

1.6.1.2 Absence of Hierarchy Among Issues

Konsep *absence of hierarchy among issues* dalam *complex interdependence* (Keohane & Nye, 2012) dijelaskan sebagai kondisi dimana isu keamanan militer tidak selalu menjadi agenda utama yang mendominasi hubungan antarnegara. Di sisi lain, isu ekonomi, sosial, lingkungan, dapat memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam sistem internasional yang semakin terintegrasi, gangguan pada sektor ekonomi atau pembangunan dapat memberikan dampak yang signifikan pada stabilitas negara. Maka, pemerintah tidak lagi memprioritaskan satu isu secara mutlak, namun harus mengelola berbagai isu secara bersamaan.

(Ruggie, 1971) menyampaikan bahwa tatanan internasional kini lebih menyerupai sebuah sistem regulasi yang bersifat horizontal dibandingkan struktur hierarkis yang kaku. Dalam kerangka tersebut, isu-isu global seperti perdagangan, pembangunan, maupun lingkungan, dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang melibatkan beragam aktor dan institusi internasional. Kondisi ini menyebabkan hilangnya batas antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Sejumlah isu

domestik kini telah masuk ke dalam agenda kerja sama internasional karena berpengaruh terhadap integrasi ekonomi dan stabilitas kawasan.

1.6.1.3 Minor Role of Military Force

Konsep *minor role of military force* dalam *complex interdependence* (Keohane & Nye, 2012) dijelaskan bahwa dalam kondisi interdependensi, penggunaan kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan utama dalam mencapai tujuan politik maupun ekonomi. Meskipun kekuatan militer tetap berperan penting dalam konteks pertahanan negara, penggunaannya sering dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan pembangunan. Selain itu, penggunaan kekuatan militer menimbulkan biaya politik dan ekonomi yang dapat mengganggu hubungan kerja sama yang telah terjalin.

Richard Cooper dalam buku “Power and Interdependence” (Keohane & Nye, 2012) menegaskan bahwa integrasi ekonomi global menciptakan mekanisme pencegahan yang membuat penggunaan konflik militer sebagai pilihan yang kurang rasional bagi negara. Negara lebih memilih menggunakan instrumen nonmiliter seperti sanksi ekonomi, pembatasan investasi, maupun tekanan diplomatik untuk menunjukkan sikap politik negara. Selain itu, dalam kawasan yang memiliki tingkat kerja sama yang tinggi, penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai tindakan yang

bertentangan dengan norma dan prinsip kolektif yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, stabilitas kawasan lebih banyak dijaga melalui mekanisme diplomasi, kerja sama ekonomi, dan peran lembaga internasional.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Multiple Channels

Dalam penelitian ini, konsep *multiple channels* dioperasionalkan melalui keterlibatan beragam aktor dalam keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah kudeta Myanmar 2021. Interaksi antarlembaga, aktor nonnegara, dan organisasi internasional dapat menjadi saluran komunikasi menjadikan kerja sama pembangunan internasional program ASEAN Connectivity masih dapat berjalan. Adanya interaksi berbagai saluran, memberikan kemudahan dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan ASEAN Connectivity dapat terlaksana karena adanya jaringan kerja sama yang luas dan berlapis, sehingga aktivitas pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada satu aktor atau satu jalur hubungan antarnegara.

1.6.2.2 Absence of Hierarchy Among Issues

Tidak adanya hierarki isu dioperasionalkan dengan melihat bagaimana agenda pembangunan kawasan dalam ASEAN Connectivity tetap menjadi prioritas meskipun ASEAN sedang

menghadapi krisis keamanan akibat kudeta. ASEAN melalui penguatan ASEAN Connectivity Strategic Plan (ACSP) 2026-2035 sebagai lanjutan dari MPAC 2025 menunjukkan bahwa ASEAN melihat pembangunan sebagai kepentingan struktural jangka panjang yang tidak dapat dikorbankan akibat krisis politik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang saling ketergantungan mendorong negara-negara untuk mempertahankan kerja sama pada isu-isu yang memberikan *absolute gains*, walaupun terdapat konflik atau ketegangan di bidang lain.

1.6.2.3 Minor Role of Military Force

Dalam penelitian ini konsep *minor role of military force* dioperasionalkan melalui pendekatan yang diambil oleh ASEAN yang mengutamakan instrumen diplomatik daripada penggunaan militer untuk menghadapi kudeta Myanmar. Pendekatan nonkoersif yang ditempuh ASEAN tercermin dalam adopsi Five-Point Consensus yang menjadi kerangka penanganan krisis Myanmar. Five-Point Consensus memprioritaskan penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke Myanmar. Poin-poin dalam Five-Point Consensus menitikberatkan pada solusi diplomatik dan kemanusiaan, bukan pada intervensi militer maupun tekanan berbasis keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi krisis politik domestik

yang serius, ASEAN tetap pada bergerak dalam kerangka *complex interdependence* yang meminimalisir peran kekuatan militer.

1.7 Argumen Penelitian

Peneliti berargumen bahwa program ASEAN Connectivity tetap dapat berlangsung melalui mekanisme adaptif dengan kerangka *complex interdependence*. Program ASEAN Connectivity tetap dapat berlanjut karena hubungan antarnegara tidak hanya bergantung pada hubungan diplomatik formal, namun juga pada jaringan interaksi yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan kolektif. Melalui karakteristik *multiple channels*, ketersediaan beragam saluran yang melibatkan mitra internasional, lembaga donor, investor hingga masyarakat sipil memungkinkan program tetap berlanjut meskipun salah satu negara anggota mengalami krisis, kelangsungan program terwujud melalui diversifikasi konektivitas. Melalui karakteristik *absence of hierarchy among issues*, ASEAN tetap mendorong agenda pembangunan kawasan di tengah dominasi isu keamanan kudeta Myanmar melalui pendekatan diplomatik Five-Point Consensus dan keberlanjutan ACSP 2026-2035. Sementara itu, melalui karakteristik *minor role of military force*, negara-negara anggota ASEAN memprioritaskan kerja sama ekonomi sebagai sarana yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas dan kepentingan bersama dibandingkan menggunakan pendekatan yang bersifat koersif. Dengan demikian, mekanisme interdependensi kompleks mendorong lahirnya strategi adaptif yang memungkinkan kerja sama pembangunan kawasan untuk tetap berlanjut meskipun dihadapi oleh ketidakstabilan politik Myanmar.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian disusun dengan metode kualitatif, di mana data yang diperoleh diolah menjadi sebuah rangkaian kata-kata. Komprehensifnya data penelitian merupakan tujuan dalam menggunakan metode kualitatif karena berfokus pada pendalaman dari hal-hal yang relevan untuk dianalisis. Kedalaman analisis pada metode ini didukung dengan adanya pengambilan data melalui wawancara, studi pustaka dengan pengumpulan dokumen, berita terkait, serta studi kasus yang relevan dengan penelitian (Sulistyawati, 2023).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian pada penulisan ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan mengenai keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah kudeta Myanmar. Penelitian tipe kualitatif deskriptif digunakan untuk mengungkapkan fakta yang ada dari sebuah analisa. Fakta yang terungkap melalui metode ini akan semakin memperdalam pendapat dan pemikiran kritis penulis ketika mendalami masalah. Data yang sudah terkumpul dari pemikiran dan analisa kritis tersebut nantinya akan dianalisis sesuai dengan pendekatan yang telah dipilih.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan sebuah lokasi yang dipilih penulis untuk menunjang pengambilan data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dipilih berdasarkan dengan kesesuaian penelitian dan sumber yang tersedia. Penelitian pada penulisan ini akan mengambil situs penelitian pada instansi

terkait seperti ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum serta lembaga-lembaga penyedia data pembangunan dan lainnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfokus pada aktor-aktor dalam ASEAN Connectivity yang memiliki pengaruh dalam keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah kudeta Myanmar. Subjek penelitian terdiri dari Negara Myanmar, negara-negara anggota ASEAN yang tergabung dalam program ASEAN Connectivity, organisasi ASEAN dan ASEAN Connectivity Coordinating Committee sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerja sama pembangunan serta investor asing, negara donor dan organisasi internasional lainnya.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian pada penulisan ini menggunakan data deskriptif yang mencakup laporan pembangunan analisis kebijakan, pernyataan diplomatik serta studi kasus mengenai pengaruh kudeta pada suatu negara. Data deskriptif primer dan sekunder yang mendukung penelitian dapat diambil lewat buku, jurnal, media online dan artikel.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder yang dapat mendukung penelitian. Sumber primer didapatkan dengan wawancara dengan pelaku kebijakan yang terlibat dalam kerja sama ASEAN pada hal ini, Bapak Ray Wibisana, Diplomat Direktorat Kerja

Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dan Bapak Raden Dodi Priyono, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum RI serta pihak yang terlibat langsung dalam kerja sama pembangunan ASEAN Connectivity. Sumber sekunder didapatkan melalui laporan resmi ASEAN, dokumen kebijakan, serta laporan pembangunan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini, penulis akan melakukan pengumpulan data yang relevan dengan penelitian melalui data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dengan tokoh atau pejabat tertentu sesuai dengan isu penelitian. Data primer atau data yang didapatkan melalui orang pertama, penulis akan mendapatkannya melalui institusi yang berkaitan dengan kerja sama pembangunan internasional yakni ASEAN, Kementerian Pekerjaan Umum dan institusi yang berkaitan dengan urusan luar negeri atau Kementerian Luar Negeri. Terbatasnya data primer yang ada, penulis akan memperoleh data dari sumber pihak kedua yakni data sekunder untuk mendukung penelitian melalui studi literatur, buku, laporan pembangunan, media berita dan kanal-kanal dunia maya. Data primer dan data sekunder yang penulis dapatkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan data guna mendukung menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari transkrip hasil wawancara, interpretasi data dan triangulasi di mana hasil analisis data akan ditarik kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan akan melewati tiga alur yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kemudian akan ada proses interaksi dalam bentuk yang sejajar dan menghasilkan sebuah analisis (Miles & Huberman, 1992).

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam menjamin kualitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data dengan melakukan verifikasi informasi dari berbagai perspektif melalui penyusunan prosedur pengumpulan serta analisis data yang komprehensif dengan cara mencatat dan mendokumentasikan seluruh data secara terstruktur.